

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012

Proses penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Panwaslu menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu tersebut di atas dapat di sampaikan oleh:

- d. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.
- e. Pemantau Pemilu.
- f. Peserta Pemilu.

Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis kepada Panwaslu dengan paling sedikit memuat:

- e. Nama dan alamat pelapor.
- f. Pihak Terlapor.
- g. Waktu dan tempat kejadian perkara.
- h. Uraian kejadian.

Laporan pelanggaran Pemilu diterima oleh Panwaslu pada hari kejadian tindak pidana pemilu itu yaitu pada tanggal 11 September 2012. Setelah Panwaslu menerima laporan tindak Pidana Pemilu, lalu Tindak Pidana Pemilu tersebut digelar di dalam sebuah tim yang disebut Tim Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), kemudian setelah ada kesepakatan dari tim bahwa laporan tersebut merupakan Tindak Pidana pemilu, maka Panwaslu menyerahkan berkas Tindak Pidana Pemilu tersebut kepada Penyidik Kepolisian beserta tersangka dan juga barang bukti, maka pada hari itu juga Panwaslu langsung menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak Polres Bengkulu.

- 2) Setelah berkas diserahkan kepada penyidik, maka penyidik melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penyidik melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi pada hari itu juga, yaitu pada tanggal 11 September 2012. Dan tersangka juga langsung dilakukan penahanan dikarenakan tersangka juga tersangkut kasus kepemilikan senjata tajam. Proses penyidikan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
 - b. Penyidik Kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya kepada JPU pada tanggal 14 September 2012.
 - c. Setelah berkas diperiksa oleh JPU, ternyata berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik karena dianggap

belum lengkap. JPU memeriksa berkas perkara selama 3 (tiga) hari dan kemudian berkas perkara dikembalikan lagi kepada penyidik pada tanggal 17 September 2012.

- d. Penyidik Kepolisian dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas, harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Penyampaian kembali berkas kepada JPU pada tanggal 20 September 2012.
- 3) Setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara dan Tersangka kepada Penuntut Umum, Kemudian Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan setelah selesai JPU harus segera melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri. Pelimpahan berkas ini dilakukan selama 5 (lima) hari, yaitu pada tanggal 25 September 2012.
- 4) Persidangan langsung dilaksanakan pada hari yang sama dan pada tanggal 27 September 2012 perkara telah diputus.

2. Hambatan dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012

- a. Hambatan dalam tahap pemeriksaan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)
 - 1) Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat, yaitu paling lambat 3 hari sejak tindak pidana Pemilu dilakukan laporan harus sudah diterima oleh Panwaslu.

- 2) Kurangnya partisipasi dari masyarakat, seperti masyarakat yang mengetahui tindak pidana Pemilu ada yang tidak bersedia menjadi saksi, sementara saksi sebagai alat bukti minimal 2 (dua) orang.
- 3) Keterbatasan personil dan kemampuan untuk menyelidik yang sama sekali tidak dimiliki oleh anggota Panwaslu.
- 4) Panwaslu tidak mempunyai wewenang untuk menggeledah dan menyita ketika masyarakat tidak mau menyerahkan barang bukti.

b. Hambatan dalam tahap Penyidikan oleh Kepolisian

Hambatan yang dihadapi di tingkat penyidikan dalam penanganan tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2012 tidak terlalu berat, diantaranya :

- 1) Adanya batasan waktu, maka Penyidik harus bekerja lebih cepat, mengingat jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilu yang sangat singkat.
- 2) Adanya pengembalian berkas perkara yang telah disampaikan kepada Penuntut Umum yang dianggap belum lengkap, sehingga membuat Penyidik harus kembali bekerja untuk menyempurnakan berkas perkara.

c. Hambatan dalam tahap penuntutan oleh Kejaksaan

Hambatan yang dialami oleh Penuntut Umum dalam proses pembuatan surat dakwaan dan pada saat penuntutan adalah karena adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang menjadi

hambatan bagi Penuntut Umum dalam menyelesaikan surat dakwaan yaitu paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dari Penyidik Kepolisian, harus sudah melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri, hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum bekerja keras dan memprioritaskan penyelesaiannya dari perkara lain.

d. Hambatan dalam tahap persidangan di Pengadilan

Hambatan yang dialami pada saat persidangan di pengadilan adalah :

- 1) Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yaitu Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum, membuat majelis Hakim segera mengadili perkara tersebut.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri (tertulis) harus sudah di sampaikan kepada Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- 3) Adanya pihak lain yang berusaha untuk mengacaukan proses persidangan dikarenakan adanya kepentingan politik bagi beberapa pihak.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilu, ada koordinasi antara Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan agar tidak terjadi hambatan dalam upaya penyelesaian tindak pidana pemilu bagi tiap-tiap instansi.
2. Diharapkan agar hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pemilu yaitu pidana maksimum sehingga ada efek jera bagi pelaku dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Juga bagi mereka yang akan berbuat tindak pidana pemilu berfikir panjang sebelum melakukannya mengingat beratnya pidana yang dijatuhkan, sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pemilu kedepan.
3. Diharapkan agar masyarakat berperan aktif dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilu, bukan hanya menjadi peran bagi lembaga-lembaga tertentu, seperti Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Jafar, M., dkk, 2006, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*, Jakarta: Kemitraan.
- Marpaung, Leden, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- MD, Moh Mahfud, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Prihatmoko, Joko J., 2008, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis, Cetakan I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, Sri, Mamuji, 1986, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukarna, 1981, *Sistem Politik*, Bandung: Alumni.
- Supranto, J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1981, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

MEDIA CETAK

Suimi Fales, *Berebut Jadi Walikota Karena Prestise dan Banyak “Lokak”*, harian Rakyat Bengkulu, edisi Selasa 25 September 2012.

Materi Konferensi Pers Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pada Pilkada.

PENGADILAN NEGERI BENGKULU
JL. S. PARMAN NO. 05 BENGKULU
TELP. (0736) 21142

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

NO. 01/PID.S/2012/PN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TONI MARYANTO BIN SUNARYO;
Tempat lahir	: Di Bengkulu;
Umur / tgl lahir	: 28 Tahun (07 Nopember 1984);
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Dagang;
Pendidikan terakhir	: SMA;
Tempat tinggal	: Desa Bukit Peninjauan 2 RT 12 RW 04 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan ketentuan pasal 116 ayat (2) jo pasal 78 huruf b Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa **TONI MARYANTO BIN SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, menghina seseorang, Calon Kepala Daerah dan Partai Politik ”;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa **TONI MARYANTO BIN SUNARYO** dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) poster 1 m x 1 m, bertuliskan “ KOTA BENGKULU KELABU “ dan “ HELMI SIAP MELANJUTKAN TRADISI KORUP DI BENGKULU “ dan foto HELMI HASAN, MURMAN EFFENDI, AGUSRIN, 199 (seratus sembilan

- puluh sembilan) stiker bertuliskan “ KOTA BENGKULU KELABU “ dan foto HELMI HASAN, MURMAN EFFENDI, AGUSRIN, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol BD 3714 PJ berikut STNKnya atas nama TONI MARYANTO dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Dan 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomer seri HGU510668, dirampas untuk negara;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah hasil Putusan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Kamis tanggal 27 September 2012**, yang terdiri dari **MUARIF, SH**, selaku Ketua Majelis, **ENDRABAKTI HERIS SETIAWAN, SH**, dan **RENDRA YOZAR D.P., SH., MH**, masing-masing selaku Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **FAHRUDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum yang dihadiri **JORDAN MAHENDRA BETSY, SH**, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua;

Dto

Dto

1. ENDRABAKTI HERIS S., SH,

MUARIF, SH

Dto

2. RENDRA YOZAR D.P., SH., MH

Panitera Pengganti

Dto

FAHRUDIN, SH

Untuk Salinan Resmi
Sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera / Sekretaris

ZAILANI SYAHIB, SH.
NIP; 1959.0314.198606.1.001.



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
/ TINDAK PIDANA KORUPSI BENGKULU**

**Jl.S.Parman No.5. Telp/Fax.0736-21142,(0736) 21948
Bengkulu 38227, Web Site :**

E-Mail : pn.bengkulu@ yahoo.com

SURAT KETERANGAN.

Nomor: 41/SK / IX / 2013 / PN.BKL.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAILANI SYAHIB, SH ;
N I P : 19590614.198606.1.001 ;
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IV.b;
Jabatan : Panitera / Sekretaris;
Menerangkan bahwa:
N a m a : ZEKA ELIYA ;
NPM : B1A008034;
Program Studi : Ilmu Hukum;
Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu;
A l a m a t : Jl. WR. Supratman Kandang Limun
Bengkulu;

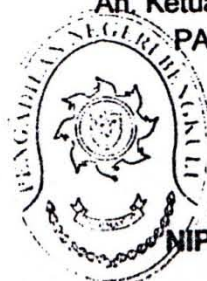
Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka mencari Data/Informasi dan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, ITONG ISNAENI HIDAYAT,SH,MH pada tanggal 24 September 2013, sehubungan dengan Penyusunan Karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

**"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALKOTA BENGKULU TAHUN
2012"**

Demikian dibuat surat keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

DIBUAT DI : B E N G K U L U.
PADA TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2013.

An. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
PANITERA/SEKRETARIS



ZAILANI SYAHIB,SH.

NIP. 19590314.198606.1.001

RIWAYAT HIDUP

Nama : Zeka Eliya

NPM : B1A008034

Fakultas : Hukum

Jurusan : Hukum Pidana

Tempat dan Tanggal Lahir : Kota Baru Santan, 11 Oktober 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

No. Hp : 0821-1194-3431 / 0878-9488-3510

Status : Menikah dengan Bayu Setyawan Nursanto dan mempunyai satu orang anak perempuan, Kaylla Maulidania

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Pendidikan : 1. SD Negeri 68 Kota Bengkulu
2. SMP Negeri 11 Kota Bengkulu
3. SMA Negeri 5 Kota Bengkulu

Alamat : Perum Nakau Asri Blok E No. 10 Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah